



# Satu Data Indonesia

**Oktorialdi, Ph.D.**

Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan,  
Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat,  
Kementerian PPN/ Bappenas

Sosialisasi Satu Data Provinsi Kalimantan Timur, 9 September 2020



# PENDAHULUAN



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39 TAHUN 2019  
TENTANG  
SATU DATA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
  - c. bahwa selama ini belum ada ketentuan yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia;

# Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019

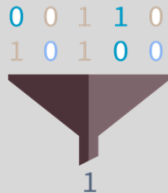
Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.



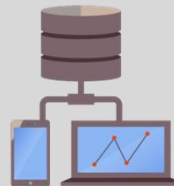
# Maksud dan Tujuan SDI



**Acuan  
Pelaksanaan  
dan Pedoman**  
Penyelenggaraan  
Tata Kelola Data



Ketersediaan Data yang  
**Akurat, Mutakhir,  
Terpadu, dapat diper  
tanggungjawabkan,**  
mudah diakses dan  
dibagipakaikan antar  
instansi



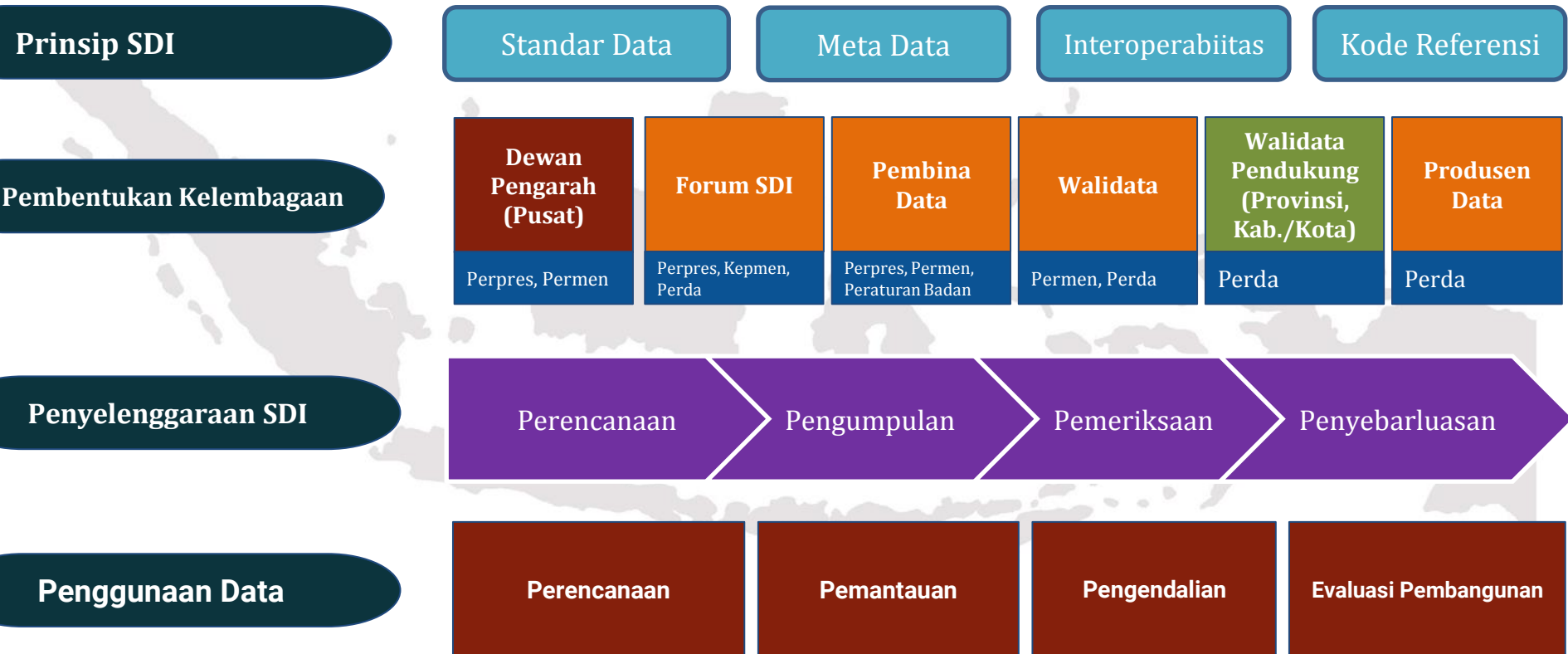
Mendorong  
**Keterbukaan dan  
Transparansi Data**



Mendukung **Sistem  
Statistik Nasional**



# GAMBARAN UMUM PERPRES NO. 39 TAHUN 2019 TENTANG SATU DATA INDONESIA





# PRINSIP SATU DATA INDONESIA



## SATU STANDAR DATA

Standar yang mengatur metodologi yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, dan satuan.



## SATU METADATA BAKU

Informasi terstruktur yang berfungsi untuk menjelaskan isi dan sumber data sehingga dapat mudah untuk ditemukan, digunakan, atau dikelola kembali.



## INTEROPERABILITAS

Kemampuan Data untuk dipertukarkan atau dibagipakai antar sistem yang saling berinteraksi.

[data.go.id](https://data.go.id)

## REFERENSI DATA

Data yang dihasilkan harus menggunakan Kode Referensi dan Data Induk yang tersedia di Portal Satu Data.



## PEMBINA DATA



Statistik



Geospasial



Keuangan Negara



Big Data

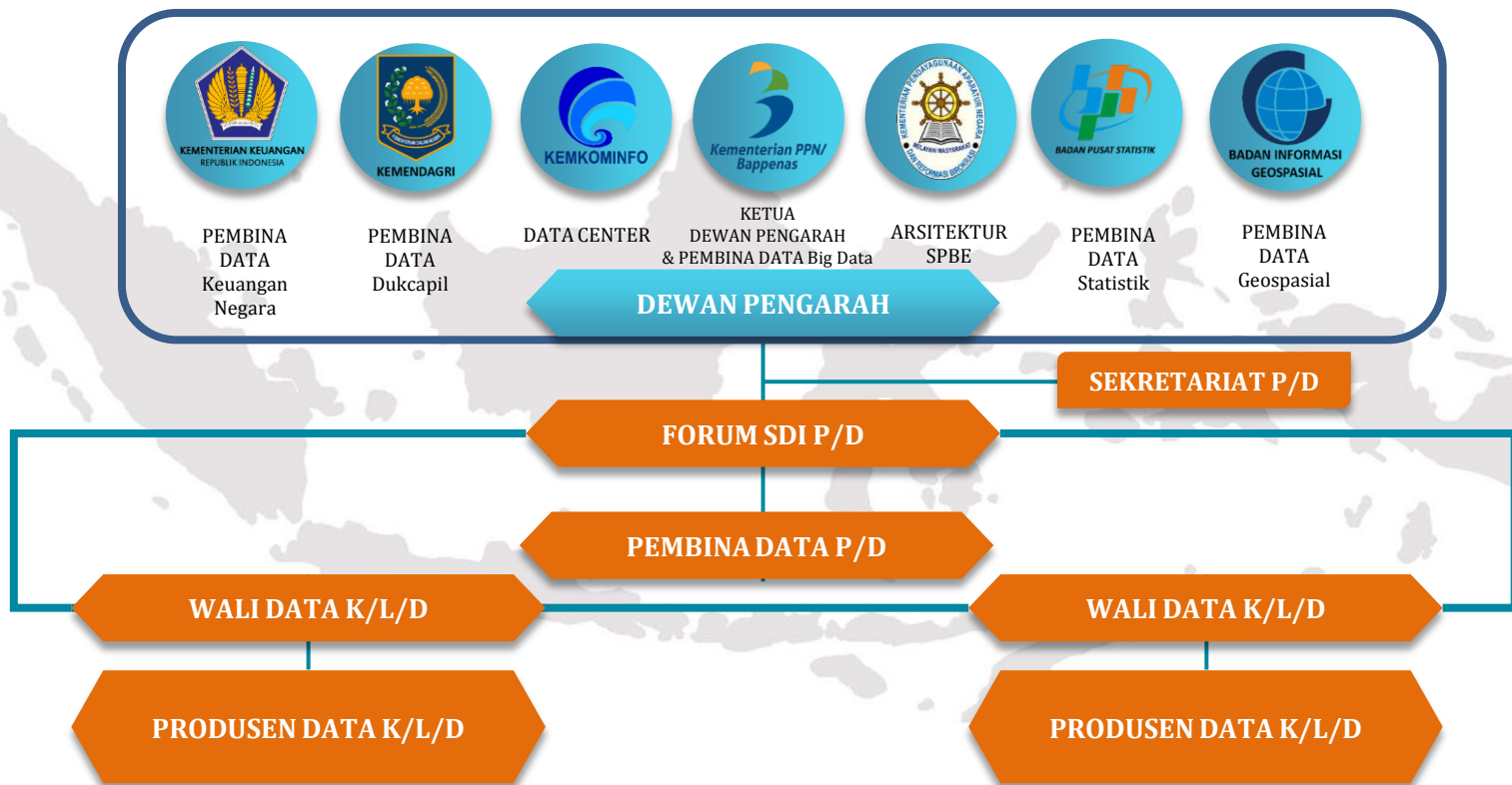


Kependudukan



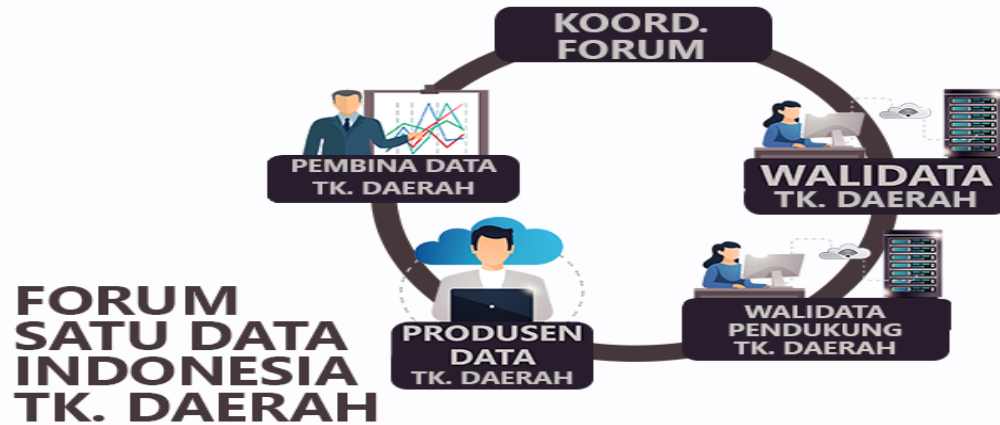
Lainnya

# Penyelenggara Satu Data Indonesia



# PENYELENGGARA SDI TINGKAT DAERAH

## DAERAH



**PORTAL SDI**





# Tugas Dewan Pengarah





# Tugas Pembina Data





# Tugas Walidata dan Produsen Data



**Mengumpulkan, Memeriksa, dan Mengelola Data** berdasarkan Prinsip SDI

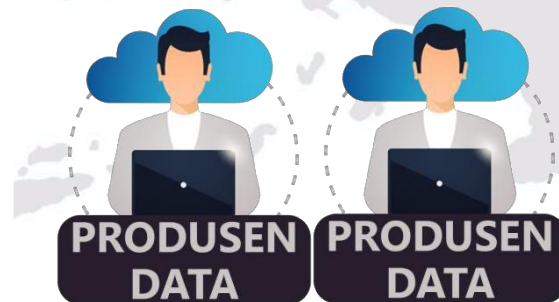
**Menyebarkan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk** di Portal SDI

**Membantu Pembina Data** dalam Membina Produsen Data.

**Memberi Masukan** mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data.

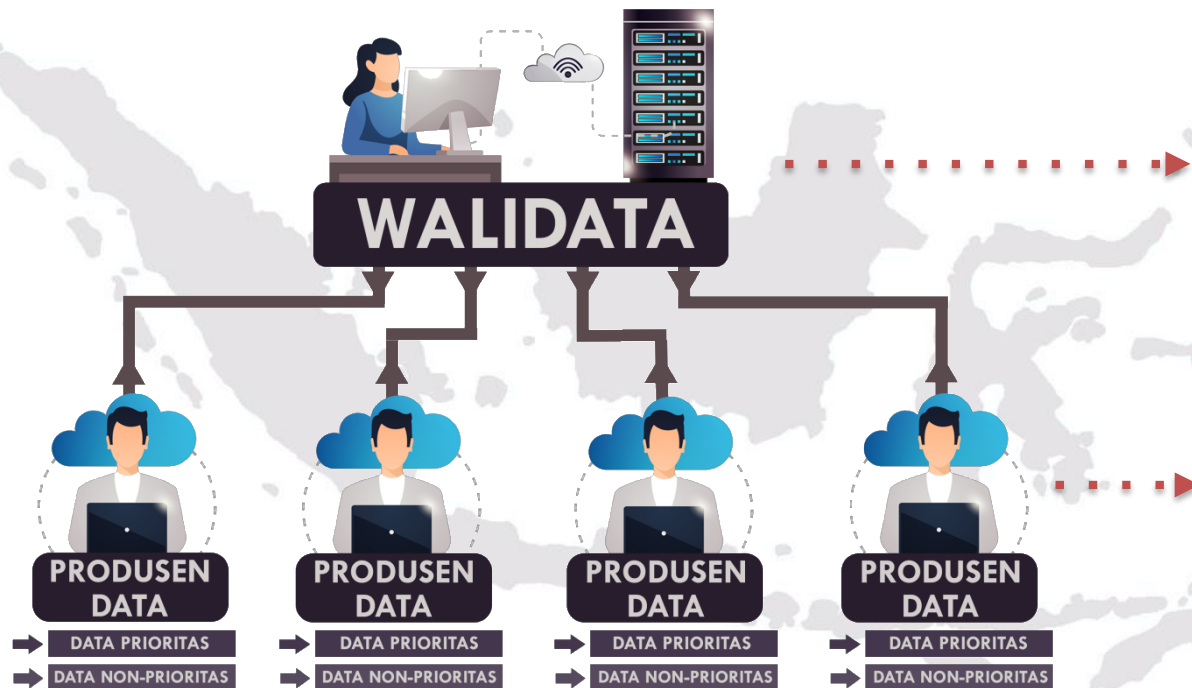
**Menghasilkan Data** sesuai Prinsip SDI

**Menyampaikan Data dan Metadata** ke Walidata





# Tata Kelola Data di K/L/D



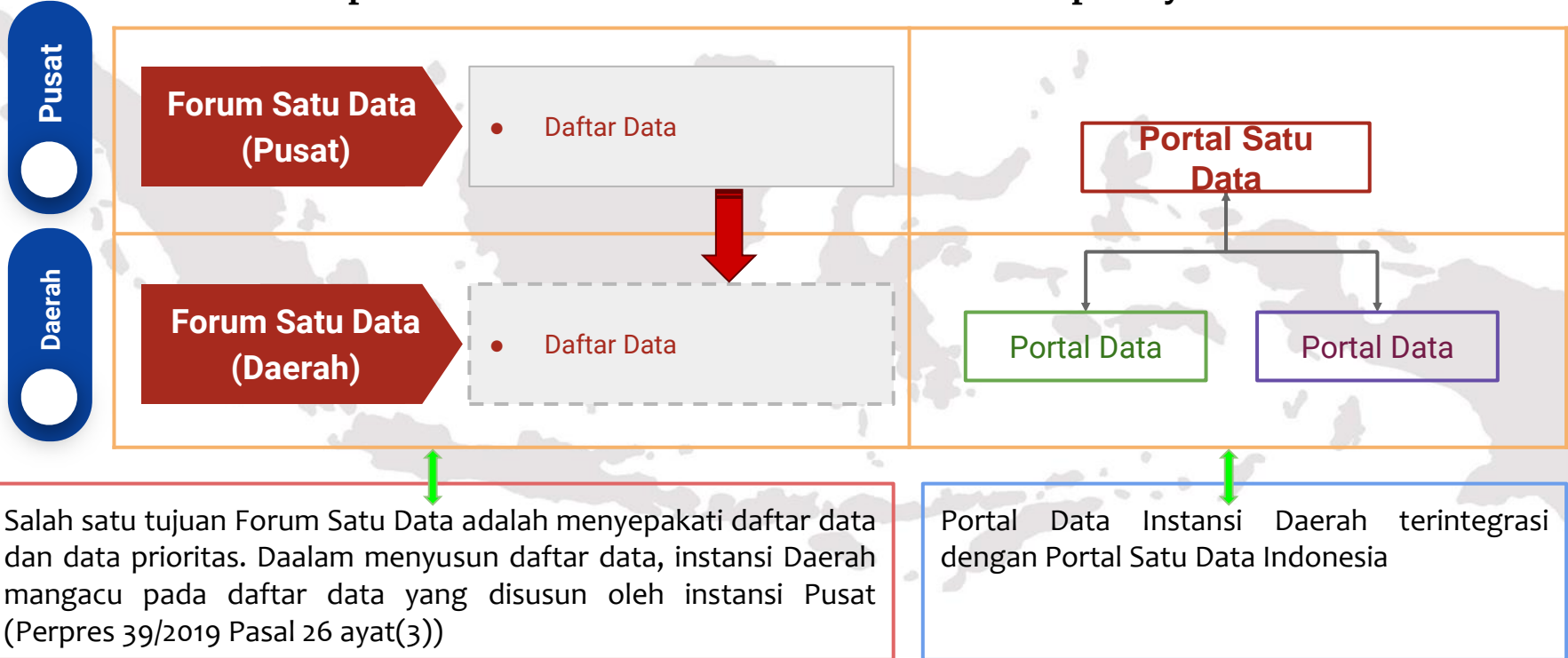
1. Mengumpulkan data
2. Memeriksa kesesuaian data
3. Mengelola data

1. Menghasilkan data
2. Menyampaikan data dan metadata kepada Walidata

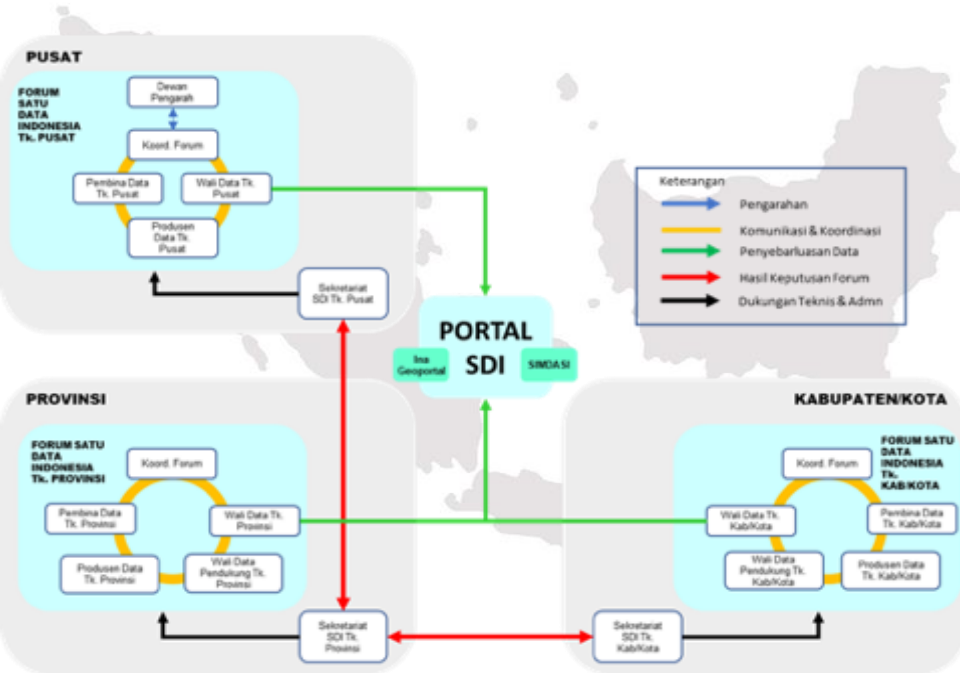
# Satu Data Pusat-Daerah

## Tahap Perencanaan Data

## Tahap Penyebarluasan Data



# MEKANISME KERJA FORUM SDI (PUSAT DAN DAERAH)



## Forum Tingkat Pusat

- **Koordinator Forum SDI Pusat:** Pimpinan tinggi Madya dari Kementerian PPN/Bappenas (Psl 16 ayat 2)
- **Anggota Forum Pusat:** Pembina Data Tingkat Pusat & Walidata Tingkat Pusat (Psl 16 ayat 1), dan dapat menyertakan Pejabat Tinggi Madya kementerian anggota Dewan Pengarah, Produsen Data dan pihak lain yg terkait (Psl 16 ayat 3)
- **Sekretariat SDI Pusat:** Memberikan dukungan teknis & Administrasi.

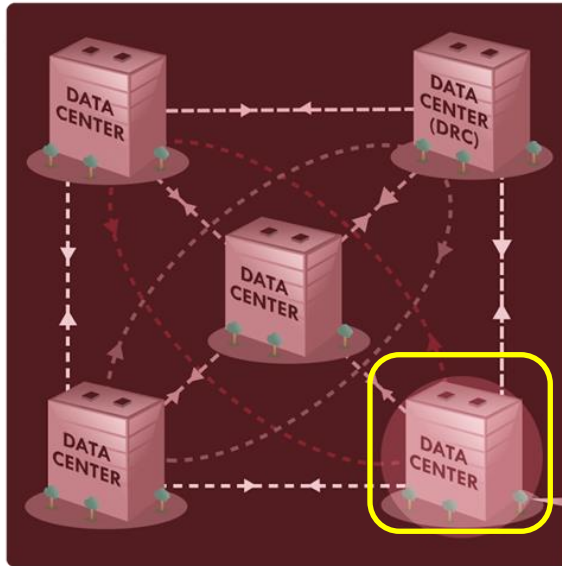
## Forum Tingkat Provinsi

- **Koordinator Forum SDI Prov.:** Kepala Bappeda Prov (Psl 23 ayat 3)
- **Anggota Forum Prov.:** Pembina Data Tingkat Provinsi & Walidata Tingkat Provinsi, Walidata Pendukung Provinsi dan Walidata tingkat kabupaten (Psl 23 ayat 4), dan dapat menyertakan Produsen Data dan pihak lain yg terkait (Psl 23 ayat 7)
- **Sekretariat SDI Prov.:** Memberikan dukungan teknis & Administrasi.

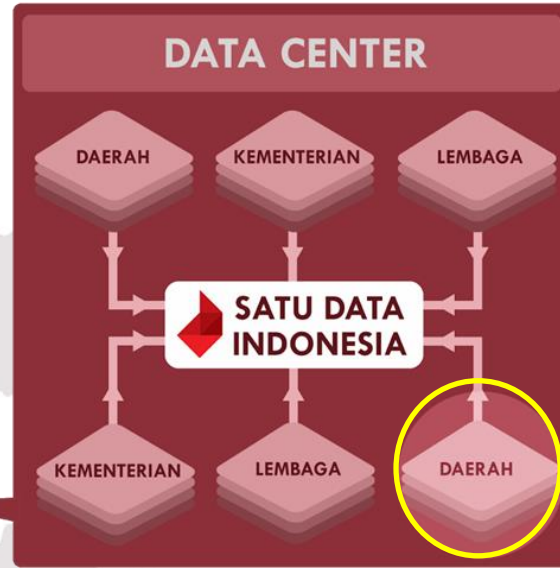
## Forum Tingkat Kabupaten/Kota

- **Koordinator Forum SDI Kab/Kota:** Kepala Bappeda Kab/Kota (Psl 23 ayat 5)
- **Anggota Forum Kab/Kota:** Pembina Data Tingkat Kabupaten/Kota, Walidata Tingkat Kabupaten/Kota, Walidata Pendukung Kabupaten/Kota (Psl 23 ayat 4), dan dapat menyertakan Produsen Data dan pihak lain yg terkait (Psl 23 ayat 7)
- **Sekretariat SDI Kab/Kota:** Memberikan dukungan teknis & Administrasi.

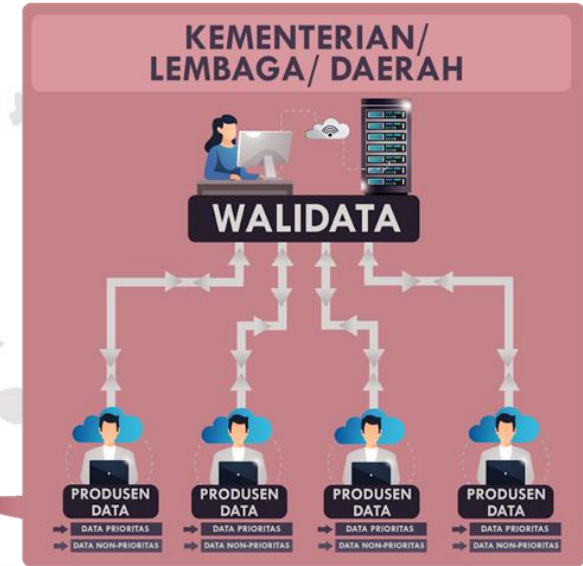
# DATA CENTER DAN SATU DATA



Setiap *Data Center* akan terhubung dengan *Data Center* lainnya.



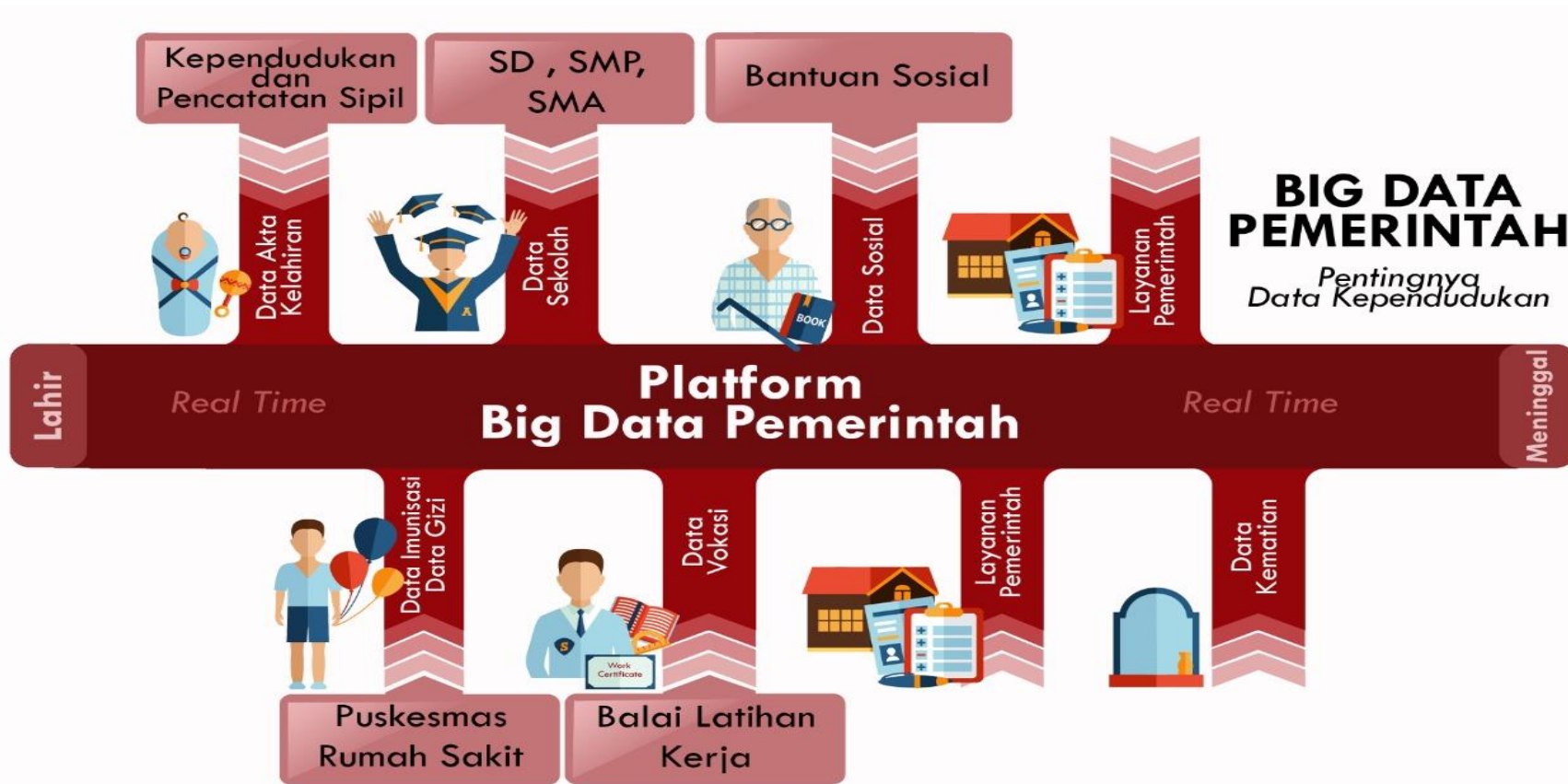
Portal Satu Data Indonesia akan terhubung dengan sistem data center melalui Portal Data Instansi di setiap K/L/D  
Setiap K/L/D mendapat 'Ruang' dalam Cloud Pemerintah (Data Center)



Tata Kelola di K/L/D masing-masing dijalankan oleh Walidata yang bertugas mengumpulkan, memeriksa dan mengelola data yang diperoleh dari Produsen Data, unit kerja yang menghasilkan data dengan mengikuti standar baku yang ditetapkan.



# Data Pemerintah








# **PROGRES SATU DATA INDONESIA**

# PERKEMBANGAN SATU DATA INDONESIA 2020

- Pembentukan Walidata di Kementerian / Lembaga Pusat
- Pembentukan Pokja Forum SDI
- Rapat Dewan Pengarah


**Persiapan Struktur dan Kelembagaan**



- Rapat Dewan Pengarah (13 Juni 2020)
- 47 K/L sudah mengkonfirmasi Walidata
- Struktur Pokja lintas K/L sudah terbentuk, akan dilanjutkan ke tahap penetapan

**Persiapan regulasi dan acuan**


- Pelaksanaan Ujicoba Juknis Metadata Statistik
- Penyusunan Rapermen Tata Kelola Portal SDI
- Penyusunan Rapermen Tata Kerja Dewan Pengarah & Forum SDI
- Penyusunan peta jalan



- Ujicoba Juknis Metadata Statistik (terlaksana 15 Juni 2020)
- Draft rapermen sudah dalam bentuk draft
- Koordinasi penyusunan peta jalan sedang berlangsung

- Sosialisasi SDI dengan K/L dan Daerah (terlaksana 3-4 Agustus, virtual)
- Reaktivasi kegiatan publikasi di media


**Sosialisasi & Komunikasi**



- Sosialisasi sudah terlaksana dengan kehadiran 45 K/L dan 24 Provinsi (>300 peserta)
- Newsletter dan konten media SDI dalam tahap penyusunan

**Persiapan Portal**

- Migrasi Portal dari KSP ke Bappenas
- Pengembangan fitur utama



- Migrasi & major upgrade portal selesai, sudah beroperasi (laman data.go.id)
- 4 provinsi dan > 12 Kab/Kota sudah terintegrasi dengan portal

# Koordinasi Strategis

1

## Koordinasi Layanan Interoperabilitas

Kemenkominfo

**Progres :** Kominfo sudah menyiapkan rapermen (disertai pedoman) layanan interoperabilitas data, sedang terus dikaji dan disempurnakan

2

## Koordinasi Penyusunan Juknis Data

Pembina Data

**Progres :** BPS sudah menyelesaikan raperka juknis standar data dan metadata Statistik dan sudah ujicoba, Pembina Data lain (BIG dan Kemenkeu) dalam koordinasi

3

## Koordinasi Kebijakan Satu Peta

BIG & Kemenko  
Perekonomian

**Progres :** Harmonisasi Kebijakan Satu Data dengan pembaharuan Kebijakan Satu Peta, sudah terlaksana beberapa kali rapat koordinasi

4

## Koordinasi Satu Data Daerah

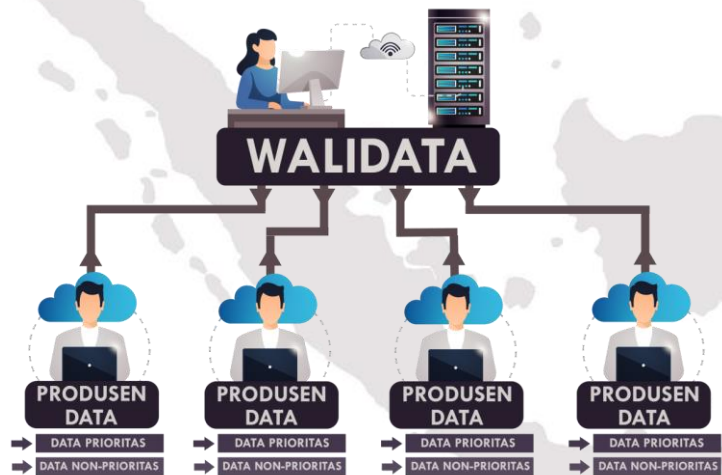
Kemendagri

**Progres :** Asesmen Sosialisasi Satu Data sudah dilakukan analisis untuk kemudian dijadikan masukan terkait program kerja implementasi di pusat dan daerah

\*

Selain koordinasi strategis, terkait data prioritas sedang dilakukan proses inventarisir serta pemetaan : daftar Data SDGs sedang dalam koordinasi untuk pemetaan perihal keterkaitannya dengan data RPJMN dan kesesuaiannya dengan standar dan metadata statistik.

# KOORDINASI INTEGRASI DATA TINGKAT PUSAT DAN DAERAH



**Konfirmasi Walidata pada 45  
Instansi tingkat Pusat**

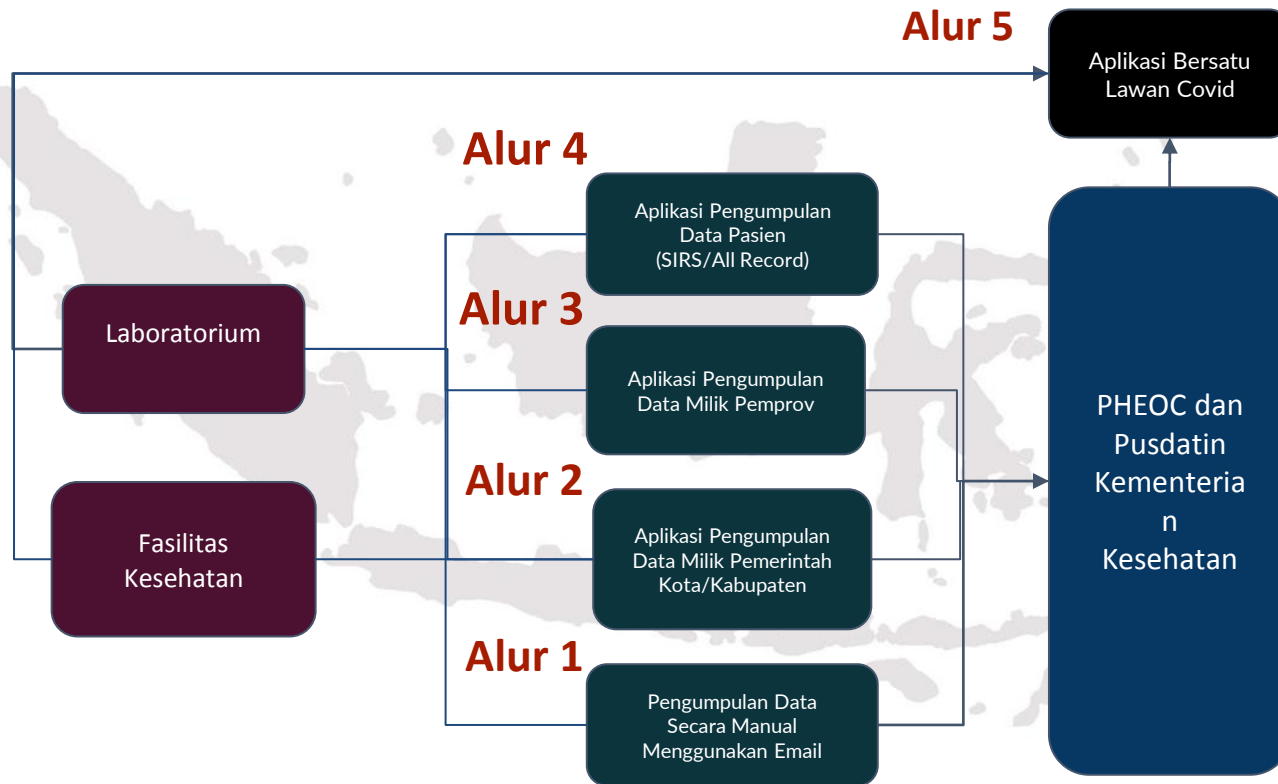


**K/L/D/I yang sudah terhubung  
dengan portal data.go.id  
termasuk di tingkat daerah.**

# **TANTANGAN DAN SKEMA SATU DATA INDONESIA DALAM UPAYA PENANGANAN COVID-19 DI DAERAH**



# TANTANGAN ALUR PENGUMPULAN DATA DI DA



Banyaknya alur pengumpulan data yang sama terkait COVID-19 dari fasilitas kesehatan dan laboratorium, menyebabkan inefisiensi SDM dan perbedaan data karena perbedaan standar dan prosedur pengumpulan.

# TANTANGAN TATA KELOLA DATA DI DAERAH



- A. Belum adanya standar data dan metadata terkait COVID-19 di daerah menyebabkan perbedaan kualitas dan kelengkapan data.
- A. Masih banyak data yang berbentuk kertas/pdf hingga sulit dibagi pakaikan.
- A. Terbatasnya SDM di laboratorium untuk entry data dikarenakan beban yang berlebih dalam entry data dan banyaknya kasus.
- A. Tidak ada koordinasi alur pertukaran dan verifikasi data antar daerah baik vertikal dan horizontal kerap mengakibatkan konflik perbedaan data.

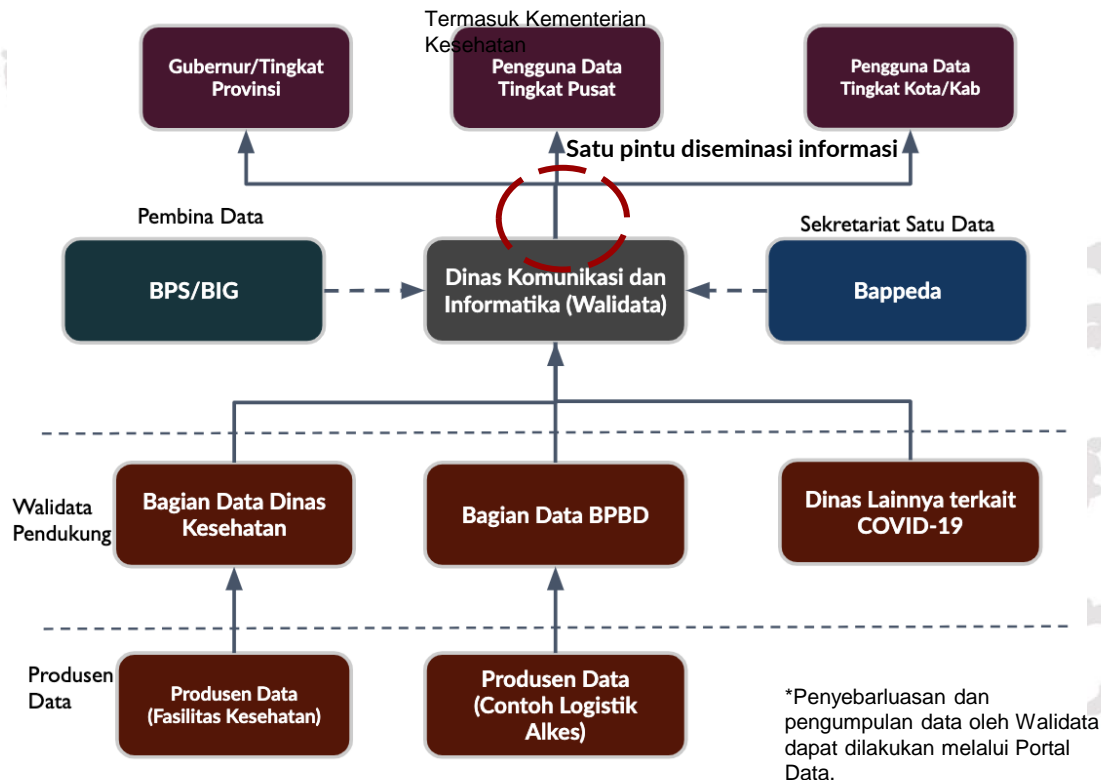
# DAMPAK AKIBAT TIDAK ADANYA TATA KELOLA DATA



Perbedaan data mengakibatkan perbedaan kebijakan warna zonasi risiko yang dihasilkan oleh masing-masing stakeholder.



# PENYELENGGARAAN ALUR DATA SDI DI DAERAH

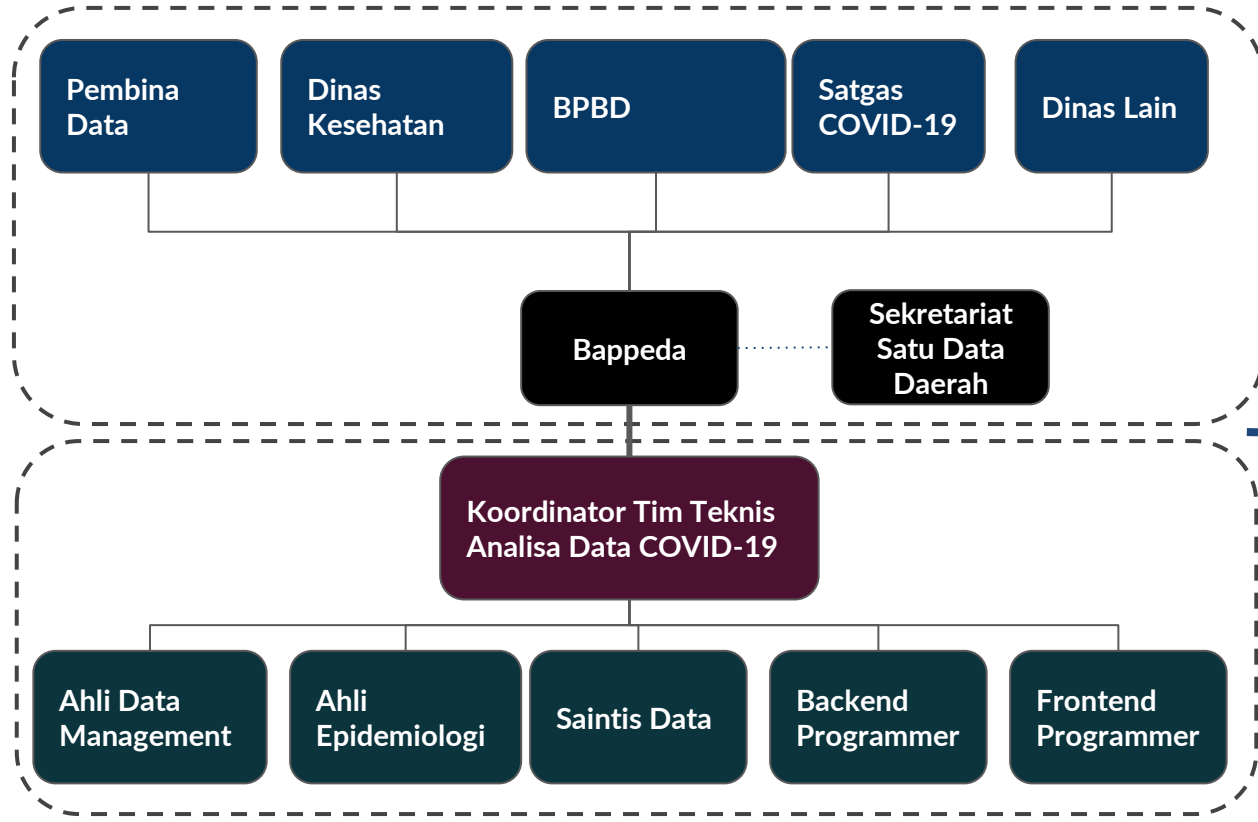


Mewujudkan ketunggalan alur data berdasarkan Peraturan Presiden no.39 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah.

Produsen data menyampaikan data dan metadata terkait COVID-19 ke Walidata Pendukung kemudian ke Walidata tingkat daerah untuk dikelola, diperiksa, dan disebarluaskan. Penyebarluasan termasuk ke tingkat nasional (Kementerian Kesehatan).

# FORUM DATA TINGKAT DAERAH KHUSUS TERKAIT DATA KASUS COVID-19

Forum  
Data



Tim  
Teknis  
Pemanfaatan  
Data  
COVID-19  
(Contoh Analisa  
Epidemiologi)

Forum data menyepakati

- A. Standar Data COVID-19
- B. Metadata COVID-19
- C. Kode Referensi
- D. Interoperabilitas
- E. Daftar Data terkait COVID-19

\*Kesepakatan berdasarkan acuan petunjuk teknis dari Pembina Data / pedoman dari pusat.

# REKOMENDASI INTEGRASI APLIKASI

## Data Layer 1

Data Kependudukan dan Catatan Sipil (Single ID Authentication)

Data Seluler / HP terkait keperluan Tracing

Data Pelaporan Kasus COVID-19 dari Daerah

Pengamanan Akses  
Standar BSSN

Feeding Data

Data Warehouse Terintegrasi

Pengamanan Akses  
Standar BSSN

Providing API

Feeding Data

Aplikasi Daerah  
Contoh SIKM

Peduli Lindungi

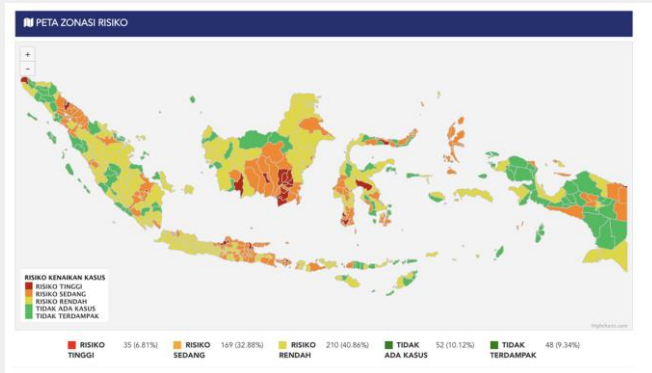
Telemedicine

Aplikasi E-Hac

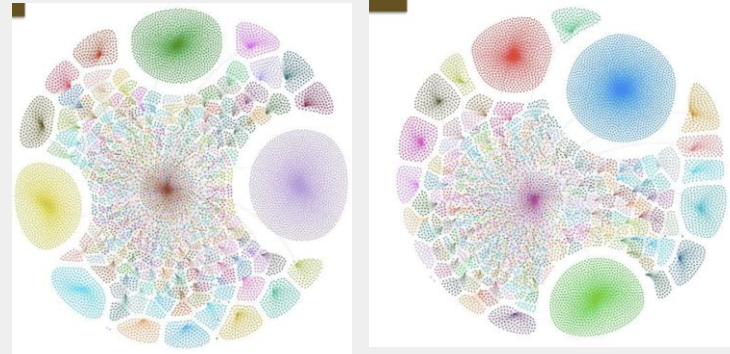
Inisiatif lain yang dikembangkan  
daerah terkait COVID-19

## Data Layer 2

Menggunakan data warehouse terintegrasi selaras dengan SPBE yang mengintegrasikan berbagai macam database dan layanan terkait COVID-19 dengan berdasarkan NIK. Melalui dasar NIK maka memudahkan untuk melakukan kegiatan *Tracing, Tracking, dan Fencing*.



Zonasi Resiko

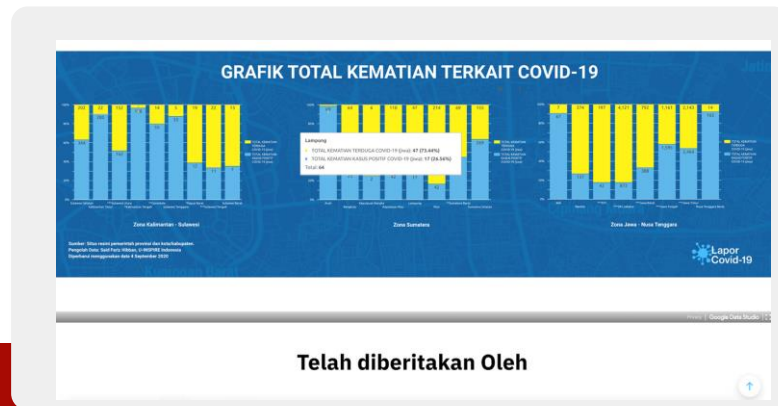


## ANALISA DATA TERKAIT COVID-19

Pemanfaatan data untuk menganalisa kondisi dan situasi Pandemi COVID-19 di Indonesia. Analisa data dilakukan untuk berbagai macam tujuan sebagai contohnya untuk memetakan resiko wilayah dengan menggabungkan berbagai macam indikator resiko persebaran COVID-19 (gambar kiri). Analisa data juga dilakukan untuk memunculkan kluster dari persebaran COVID-19 (gambar kanan)

Sumber : BNPB dan Kementerian Kesehatan

# CONTOH INISIATIF MASYARAKAT



## PELAPORAN DATA OLEH MASYARAKAT

Menggunakan pendekatan crowdsourcing yang melibatkan partisipasi warga memungkinkan Lapor COVID-19 menjadi jembatan pencatatan angka kejadian COVID-19 di tanah air. Wadah ini mampu membantu pemerintah dan warga lain untuk mengetahui besaran sebaran serta magnitudo COVID-19. Keluaran yang diharapkan adalah data yang terkumpul di LaporCOVID-19 menjadi masukan bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan dan langkah penanganan COVID-19 di lapangan.

Sumber : LaporCOVID-19

## 1. Acuan Penyelenggaraan Data

SDI mendorong penyusunan acuan penyelenggaraan data di instansi-instansi daerah termasuk bidang kesehatan. Instansi daerah perlu berkomitmen melaksanakan penyelenggaraan sesuai tata kelola Satu Data : menentukan Walidata, Walidata Pendukung & Produsen Data, menerapkan standar data dan menyebarluaskan data kepada publik melalui media penyebarluasan yang terintegrasi.

## 2. Konsolidasi Data

Konsolidasi data dalam Satu Data Indonesia diawali dengan implementasi prinsip-prinsip Satu Data (standar data, metadata, kode referensi) yang dihasilkan oleh Produsen Data di Daerah. Pemeriksaan kesesuaian dan kelengkapan dilaksanakan oleh Walidata dan Walidata Pendukung untuk kemudian disebarluaskan melalui portal data.

## 3. Forum Satu Data (Daerah)

Forum Satu Data Indonesia tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota berperan sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan penyelesaian masalah implementasi Satu Data Indonesia.

## 4. Kelompok Kerja Bidang Hubungan Daerah

Untuk mendukung koordinasi dan percepatan pelaksanaan Satu Data di tingkat Daerah, Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat akan Membentuk **Kelompok Kerja bidang Hubungan Daerah** (Dalam Proses Penyusunan).

**TERIMA KASIH**